



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 212/PMK.011/2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA  
MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,  
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK  
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG  
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN NEGARA

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR  
KEPERLUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
1.	Senjata Api	Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang, beserta asesoris dan kelengkapannya
2.	Amunisi	Amunisi kaliber kecil

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada :  
Kepala KPUBC/KPPBC

( kantor pabean tempat pemasukan )

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dinyatakan berikut ini :

**SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR  
(SP-7)**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L/AVB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. XIV PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :  
1. (dokumen petengkap pabean)  
2. (kontrak pengadaan)  
Tembusan :  
1. Menteri Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeuan;  
3. ....  
4. ....

\*Nomor : KEP. /WBC.../KP.../20...  
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....;  
\*\*2) PPN dan PPh-BM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....;  
\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....;  
Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang Menyatakan :  
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
..... (Jabatan)

.....  
Nama  
Pangkat

a.n. MENTERI KEUANGAN  
Kepala KPUBC/KPPBC,

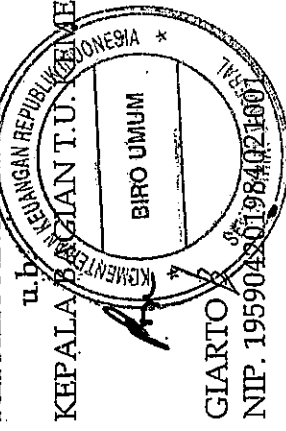
(Nama)  
(NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
\*\*Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeuan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO LAMMIM

u.p. Kepala BIRO LAMMIM  
MENTERIAN



GIARTO  
NIP. 195904801984021600

MENTERI KEUANGAN,

ttt.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO